

---

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DATA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO**

Wigia A.L. Junus<sup>1</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, I Gede Suwetja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia

E-mail: wigiaangeline@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the implementation of SIMDA to the management of financial data at the Regional Finance and Asset Management Board (BPK-AD) Manado City is in accordance with the general principles of local financial management. SIMDA is an application developed by BPKP to simplify regional financial management tasks. The research method used in this research is qualitative research by using interview technique with key informant, direct observation to the symptoms that appear in BPK-AD of Manado City and documentation study on related documents. The data collected were analyzed by descriptive method. The result of the research shows that the implementation of financial SIMDA to the management of financial data at Manado Finance and Regional Management Board (BPK-AD) of Manado City has not been fully in accordance with the general principle of local financial management.*

**Keywords:** *Implementation of SIMDA, management of financial data, and general principles of local financial management.*

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat saat ini mendorong seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi terhadap pelaporan keuangan. Menurut Yossi Lusiana (2013) masyarakat modern dikenal sebagai masyarakat informasional. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan yang efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang cepat dan akurat sehingga mampu memberikan informasi yang handal dan relevan bagi penggunaannya. Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem informasi manajemen. SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. (Tata Sutabri, 2016:82). Sistem informasi yang digunakan lebih berfokus pada sistem informasi berbasis komputer. Harapan yang ingin diperoleh di sini adalah bahwa dengan penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi berbasis komputer, informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien (Pulungan, 2014)

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut:

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban

untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) (Natalia Lumintang, 2015). SIMDA dirancang oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) yang dikembangkan untuk membantu manajemen pemerintahan mencapai sasaran organisasi dalam hal ini mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah baik ditingkat pelaporan ataupun ditingkat akuntansi. Aplikasi ini digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja. SIMDA merupakan program pengolah data keuangan yang cepat, lengkap dan akurat. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu apakah implementasi SIMDA terhadap pengelolaan data keuangan di BPK-AD Kota Manado sudah sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No.13 Tahun 2006? Tujuan penelitian untuk mengetahui mengevaluasi implementasi SIMDA terhadap pengelolaan data keuangan di BPK-AD Kota Manado sudah sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No.13 Tahun 2006.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Hery (2015:6), secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi. Sedangkan L.M. Samryn (2014:3) menyatakan secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) akuntansi adalah seni mencatat, penggolongan serta pengikhtisaran dengan cara-cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi serta kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasilnya. Sedangkan menurut American Accounting Association (AAA), *Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information.* Pengertian Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian, keputusan yang jelas dan tegas bagi semua yang menggunakan informasi tersebut.

### **2.2 Konsep Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bernilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna, atau dengan kata lain sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas (Rahmat Taufiq, 2013: 2). Lucas dalam Hartono (2013:20) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen sebagai seperangkat prosedur yang tersusun dengan baik yang pada saat dijalankan, menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Secara umum, Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang

bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, Rizan. 2013).

### **2.3 Konsep Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Menurut Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu, pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

SIMDA Keuangan adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, dimana tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempercepat proses reformasi pengelolaan keuangan daerah (Heri Sulistiyono, 2014). SIMDA keuangan untuk dapat mendukung akselerasi reformasi pengeolaan keuangan daerah tersebut, dikembangkan secara terintegrasi dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Fungsi Perencanaan, di dalam SIMDA Keuangan, sebelum memasuki tahap penganggaran, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun/menetapkan terlebih dahulu program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut.
2. Fungsi Penganggaran, dengan telah ditetapkannya program dan kegiatan barulah pemerintah daerah dapat melakukan proses penginputan data anggaran.
3. Fungsi Penatausahaan, dengan telah ditetapkannya APBD (yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan), maka berdasarkan APBD tersebut pemerintah daerah dapat melaksanakan realisasi kegiatannya dan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan penatausahaan ini dihasilkan dari aplikasi SIMDA.
4. Fungsi Pertanggungjawaban dan Pelaporan, berdasarkan anggaran dan penatausahaan, aplikasi simda dapat secara otomatis menyusun laporan keuangan., seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Tidak hanya laporan pokok saja, tetapi juga dihasilkan laporan-laporan yang dapat membantu pemerintah daerah di dalam melakukan analisa dan verifikasi.

### **2.5 Good Governance**

Menurut Devania Sukma (2013) pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

---

Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sector public adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

## **2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

### **2.6.1 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memuat asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Tertib
2. Taat pada peraturan perundang-undangan
3. Efektif
4. Efisien
5. Ekonomis
6. Transparan
7. Bertanggung jawab
8. Keadilan
9. Kepatutan
10. Dan manfaat untuk masyarakat

Pengertian asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawaban.
2. Taat pada peraturan perundang –undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.
7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan & pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif .
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **3 METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis & Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif guna menjelaskan apakah implementasi SIMDA terhadap pengelolaan data keuangan di BPK-AD Kota Manado sudah sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No.13 Tahun 2006.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung peneliti melalui wawancara dengan pegawai Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPK-AD) Kota Manado. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil observasi dan dari studi pustaka.

#### **3.2 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah metode deskriptif yaitu untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyaring informasi, keterangan-keterangan, dan data-data secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran evaluasi penerapan SIMDA keuangan terhadap pengelolaan data keuangan untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Evaluasi Implementasi Aplikasi SIMDA Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan

##### **1. Asas Tertib**

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, pengertian asas tertib ialah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didukung dengan *Accounting Principles Board Statement No.4* (dalam Belakaoui, 2006, h.212) yang mengklasifikasikan tujuan kualitatif dalam laporan keuangan, yaitu ketepatan waktu. Artinya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari hasil wawancara dapat dirumuskan bahwa operator SIMDA keuangan BPK-AD Kota Manado telah mengetahui tugasnya sebagai pengelola bidang keuangan daerah, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Walikota Manado Tahun 2016. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, karena sering terjadi kesalahan pengertian antar operator yang menyebabkan tidak tercapainya ketepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan.

##### **2. Asas Taat pada peraturan perundang-undangan**

Berdasarkan pengertian asas taat pada peraturan perundang-undangan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BPKP (2008) menyatakan bahwa salah satu nilai tambah aplikasi SIMDA keuangan, yaitu *output*/laporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dapat dirumuskan bahwa SOP telah diterapkan sebagai pedoman dalam pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan yang didasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada. Namun belum terlaksana secara maksimal oleh pengguna SIMDA itu sendiri.

##### **3. Asas Efektif**

---

Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, pengertian asas efektif ialah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Target yang dimaksud adalah ketepatan waktu dalam pengelolaan data keuangan. Berdasarkan pendapat Indriasari dan Nahartyo (2008) yang mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Hasil wawancara dapat dirumuskan bahwa telah dilakukan peningkatan pemahaman dan wawasan SDM terhadap aplikasi SIMDA keuangan. Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan belum cukup karena asas tertib dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya tercapai, maka dirasa kurang efektif.

4. Asas Efisien

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil wawancara dirumuskan bahwa dengan diterapkannya aplikasi SIMDA keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah telah memberikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan ketepatan waktu yang lebih cepat dan efisien di BPK-AD Kota Manado. Aplikasi SIMDA keuangan ini dapat meminimalisir kesalahan sehingga output yang dihasilkan lebih baik daripada menggunakan sistem manual. Hal ini sesuai dengan keunggulan yang dijanjikan SIMDA Keuangan (BPKP, 2008), yaitu: efisiensi dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya. Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.

5. Asas Ekonomis

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. Hasil wawancara dapat dirumuskan bahwa dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA keuangan membantu terwujudnya asas ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah, karena kebutuhan akan data lebih mudah dan cepat diperoleh dan informasi keuangan dapat diakses oleh semua pengguna secara terbuka dan gratis.

6. Asas Transparan

Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Berdasarkan hasil wawancara, transparansi terhadap implementasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan kemudahan untuk melihat dan mengakses informasi laporan keuangan. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiscal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (IMF, 1998 dalam (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).

7. Asas Bertanggung jawab

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Supriono (2000:142) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar akuntansi pertanggung jawaban dapat digunakan dengan baik dalam poin keenam dijelaskan bahwa pelaporan kinerja dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggung jawaban harus disajikan tepat waktu. Hasil wawancara dapat dirumuskan bahwa proses pertanggung jawaban dalam tugas pengelolaan dan pelaporan belum maksimal karena asas tertib dalam ketepatan waktu menghasilkan laporan keuangan belum terlaksana.

8. Asas Keadilan

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan & pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif . Hasil wawancara didapati bahwa pembagian tugas dan wewenang di BPK-AD Kota Manado sudah berjalan dengan baik yang juga ditunjukkan dengan jalannya proses pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja kurangnya tenaga SDM yang kompeten seringkali menyebabkan terjadinya penumpukan tugas berkala.

9. Asas Kepatutan

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Hasil wawancara dapat dirumuskan bahwa BPK-AD Kota Manado memiliki faktor pendukung mengenai disposisi atau sikap yang baik untuk menerima atau setuju dengan penerapan SIMDA keuangan dan melaksanakannya dengan senang hati. Kepatutan dapat diwujudkan karena ada aturan-aturan. Menurut Kholberg (1969) dan Rest (1979) dalam Wilopo (2006) menerangkan melalui kasus etika akuntansi yang mencerminkan moralitas manajemen pada poin ketiga tentang ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi merupakan aturan yang dibuat agar laporan keuangan yang disajikan dibuat dalam format yang sama dan sesuai agar memudahkan para pengguna laporan keuangan tersebut dalam mengambil keputusan lebih lanjut. Yang berindikator pada : tanggung jawab penerapan, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi, standar teknis.

10. Asas Manfaat untuk masyarakat

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan tinjauan pustaka, BPKP menyatakan bahwa aplikasi SIMDA merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan otonomi daerah, sesuai misi BPKP yaitu, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN. Kebutuhan akan masyarakat juga bisa dilihat pada sepuluh jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) kota Manado telah menerapkan aplikasi SIMDA keuangan sebagai aplikasi pengelola data dan informasi keuangan. Aplikasi sistem informasi manajemen ini yang membantu BPK-AD mengelola keuangan mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan. Namun implementasi

---

SIMDA keuangan terhadap pengelolaan data keuangan di BPK-AD Kota Manado bidang akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No.13 Tahun 2006. Karena asas tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, bertanggung jawab, dan keadilan belum maksimal diwujudkan. Yang menjadi faktor penyebab belum terwujudnya asas-asas tersebut yaitu sumber daya manusia yang kurang kompeten.

#### **Saran**

Adapun saran untuk pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kota Manado yaitu untuk perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan operator SIMDA keuangan, khususnya pada bidang akuntansi. Sedangkan untuk operator SKPD harus segera melakukan koordinasi dengan operator bidang akuntansi apabila terjadi perubahan data keuangan. Operator juga harus lebih teliti lagi dalam menginput data dan perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengelola data keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) kota manado.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- American Accounting Association, <http://www.jstor.org/stable/245668>, p43
- Anwar Sanusi. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Hartono Bambang, 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta.
- Hery, 2015. *Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition*. PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta.
- Kautsar Riza Salaman, Mochammad Farid, 2016. *Akuntansi Manajemen Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Indeks. Jakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Proses SIMDA ( <http://herisulistiyonomts142730639.blogspot.com>)
- Rahmat Taufiq. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romney, Marshall B. Paul John Steinbart, 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga Belas. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Samryn L.M. 2014. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satgas Pengembangan SIMDA, 2008 ([www.BPKP.go.id](http://www.BPKP.go.id))
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tata Sutabri, S.Kom., MMSI, 2016. *Sistem Informasi Manajemen (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Tujuan dan Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Manajemen dalam Bidang Publik ( <http://yossian586.blogspot.co.id>)
- Yakub, 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.